

**STRATEGI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KEJURUAN DI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh :

Fauzie Akbar



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION STRATEGY VOCATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT IN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

Development programs and activities of vocational education oriented to the strategic objectives of secondary vocational education development referring to the Implementation Strategic Plan of Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung is the availability and affordability of secondary vocational education services quality, relevant and equitable in all provinces, districts and cities. In order to improve the quality of vocational school, then to the achievement or fulfillment of the quality of education SMK made a policy to develop vocational education. This study aims to determine how the Implementation strategy of SMK in the development of vocational education in Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung

This study used qualitative research methods. The data used are primary and secondary data. The data that has been processed then presented in the form of a description, and interpretation or construed to be discussed and analyzed qualitatively, then to draw a conclusion

Based on the results of research and discussion in mind that the Implementation Strategy of Local Government in the development of vocational education in Vocational School District 4 Bandar Lampung is not optimal, because the implementation is influenced by a variety of capacities and constraints faced by the implementing agency. Development policy process is still using the guidelines and the guidelines of the central government, so that the strategies do not yet implemented optimally caused by various factors affecting among other things. Communication in the development strategy of vocational education in SMK Negeri 4 less done well. Disposition of bureaucracy into the factors that affect the implementation of the policy of vocational education at SMK 4, this policy is still need for regulation or decision of education must be made. Factors Resources in the development of vocational education policy SMKN 4 is still not optimal. The organizational structure in the implementation of vocational education policy further expand the concept and implementation of top-down models wide approach in the context of the implementation of public policies that have been used are not relevant in the context of vocational education.

Keywords: Strategy, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Vocational Education.

ABSTRAK

STRATEGI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

Program dan kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu pada Rencana Implementasi Strategi SMKN 4 Bandar Lampung, yaitu tersedianya dan terjangkau layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di kota Bandar Lampung. Dalam rangka meningkatkan kualitas SMK, maka untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan SMKN 4 membuat kebijakan dalam mengembangkan pendidikan kejuruan di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi Implementasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Strategi Implementasi dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung belum optimal, karena dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai kapasitas dan kendala yang dihadapi oleh instansi pelaksana. Proses pengembangan kebijakan ini masih tetap menggunakan juknis dan juklak, sehingga strategi yang dilakukan belum terlaksana secara optimal yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang berpengaruh antara lain. Komunikasi dalam strategi pengembangan pendidikan kejuruan di SMK Negeri 4 kurang terlaksana dengan baik. Disposisi birokrasi menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan kejuruan di SMKN 4, kebijakan ini masih perlu adanya perda atau keputusan dinas pendidikan harus dibuat. Faktor Sumber daya dalam kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan SMKN 4 masih belum optimal. Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan kejuruan lebih memperluas konsep dan pendekatan model implementasi *top down* dalam konteks implementasi kebijakan publik yang selama ini tidak relevan digunakan dalam konteks pendidikan kejuruan.

Kata Kunci: Strategi, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4, Pendidikan Kejuruan.

**STRATEGI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KEJURUAN DI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Fauzie Akbar

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KEJURUAN (STUDI PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4)**

Nama Mahasiswa

: **Fauzie Akbar**

No. Pokok Mahasiswa

: **0856041015**

Jurusan

: **Ilmu Administrasi Negara**

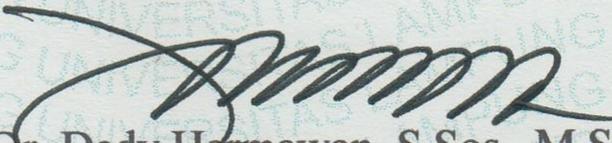
Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 196911032001121002**

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP 197507202003121002**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

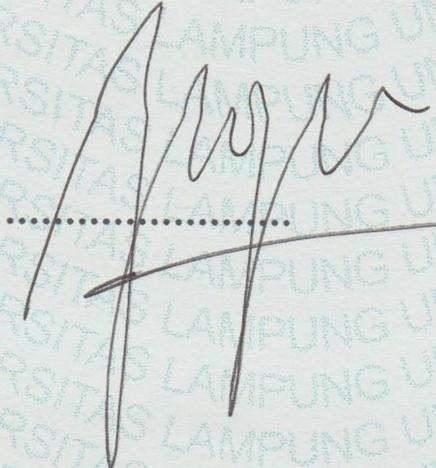
Ketua

: Dr. Noverman Duadji, M.Si.



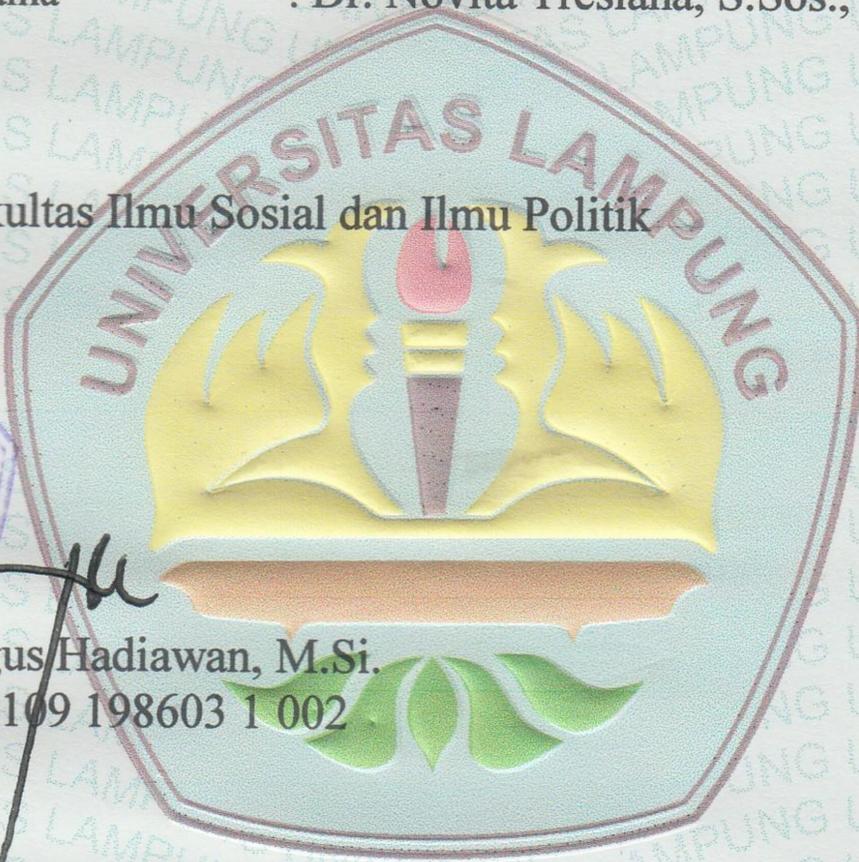
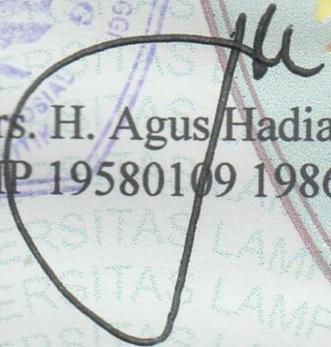
Penguji Utama

: Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 25 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

TGL. 20

0A513ADF880100892

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fauzie Akbar

NPM. 0856041015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fauzie Akbar lahir di Semarang tanggal 22 Oktober 1990. Penulis merupakan anak Ketiga dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak H..Rustam Effendy dan Ibu Hj. Kartini. Penulis sangat beruntung dan bersyukur karena dilahirkan dalam keluarga harmonis dan kebahagiaan yang selalu tercurah, hal inilah yang mendasari penulis untuk selalu berbakti dan mengutamakan keluarga.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri GRIBA 14 Bandung pada tahun 1996-2002, SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2002-2005, dan dilanjutkan di SMAN 9 Bandar Lampung pada tahun 2005-2008. Selanjutnya pada tahun 2008 penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis pada tahun 2008 tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara), pada tahun 2010 penulis pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara), dan penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Lampung di Desa Kedaton Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan

MOTO

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. (Ibu Kartini)

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

(Abu Bakar Sibli)

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.

(FAUZIE AKBAR)

PERSEMBAHAN

Segala Puji hanya bagi ALLAH SWT

Dengan segala kerendahan hati kuucapkan syukur atas karunia Mu kepadaku

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

*Bapakku Tercinta H. Rustam Effendy
Mamaku tercinta Hj. Kartini*

Selalu menjadi sumber inspirasi di dalam kehidupanku. Selalu mendoakan dan mendukung segala aktivitas kuhingga sekarang. Semua curahan kasih sayang yang kalian berikan tidak akan mampu aku gantikan dengan apapun.

Tiarani Andina

Kehadiran mu menyempurnakan hidupku
Semoga kita berhasil dan tetap menjadi kebanggaan orang tua

*Seluruh keluarga besarku, Sahabat, Teman-temanku dan adik
tingkat yang selalu mendukungku*

Terimakasih atas semua dukungannya

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing utama. Terimakasih bapak atas arahan, nasehat, saran, masukan, waktu, kesabaran dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si yang telah berkenan menjadi dosen pembahas. Terimakasih Ibu atas kritik, saran, arahan, waktu serta kesabaran yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran administrasi skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya.
7. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan SMKN 4 yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai. Terimakasih kepada Bapak Krisna Laksamana dan Bapak Sujana Mei Raharja pihak yang terkait atas kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku. Bapak, Mama dan nenek yang tak pernah lelah memberikan doa, semangat, motivasi dan selalu bekerja keras untuk membiayai anak-anaknya agar menjadi lebih baik. Terimakasih Bapak dan Mama yang selalu jadi penyemangat dan inspirasi dalam hidupku dan selalu mengingatkan untuk selalu dekat dengan Allah SWT dengan rajin shalat, mengaji dan berdoa. Doakan selalu anakmu, insyaallah akan sukses dan dapat membanggakan keluarga. Serta Kakanda dan Ayunda Gilang Gunawan, Dian Atika.
9. Terimakasih pada Tiarani Andina Partner terbaik atas kerjasama ketika susah dan senang, bantuan, dukungan, doa, motivasi dan semangat selama penelitian hingga akhir skripsi.

10. Terimakasih pada teman-teman seperjuangan untuk Rizky Okto Danela, Tomy Yordan, Sebastian Akbar, Alan Krisnawan, Andika Prasetya, Ikhsan Haqiqi, Muhamad Ghulam, Arja Adi Wangsa, Rizky Dwi Saputra, Dimas Abiyoga yang selalu memberikan waktu, semangat serta bantuan kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman ASEPPUDIN ANE 08, Joko, Yondri, Vidi, Toha, Ferli, Ardian Uwak, Rizky, Rendi, Candra, Merah, Ferdi, Topan, Reza, Ditto, Handry, Nanda Kurniawan, Ucok, yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua".
12. Semua angkatan ANE 09 Guruh, Angga (mok), Fahmi, Agus (Mamang), Agus (Nyom), Aris (Ambon), Ruli, Rioga (Oge), Bahri, Dedek.
13. Temen-temen 2010 Helyus uyung , Rizal, Rido, Bek, Widi Loy, Ardi, Tian, Bogel, Datas atas bantuannya.
14. Temen-temen 2011 Fauzi, Wahyu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Strategi	8
B. Kebijakan Publik	10
C. Implementasi Kebijakan	14
D. Model Implementasi Kebijakan	16
E. Tinjauan Tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan	21
F. Acuan Mutu Pendidikan	23
G. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Teknik Keabsahan Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Singkat SMK Negeri 4 Bandar Lampung.....	39
B. Visi dan Misi SMK Negeri 4 Bandar Lampung	40
C. Struktur Organisasi	41
D. Sarana dan Prasarana	45
E. Kondisi SDM SMK Negeri 4 Bandar Lampung	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bandar Lampung.....	49
B. Pembahasan Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bandar Lampung.....	65

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat maupun daerah telah mengupayakan, memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan pendidikan, yaitu dengan adanya desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan urusan pendidikan nasional secara luas kepada pemerintah kabupaten atau kota dan secara parsial terbatas kepada provinsi, sebagaimana hal-hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta ketentuan perundang-undangan turunannya.

UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional mengatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak kajian menyatakan tentang besarnya suatu bangsa dikarenakan pendidikan. Terdapat kuatnya hubungan antara pendidikan sebagai sarana pengembang sumber daya manusia dengan kualitas dan kemajuan suatu bangsa yang adil dan makmur. Pendidikan yang mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat menentukan, terutama dalam mengejar ketertinggalan bangsa ini dari bangsa-bangsa lain. Dalam Suryadi (2002), keberhasilan pembangunan ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, dan manusia yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah manusia yang mempunyai kemampuan membangun. Kemampuan membangun dapat dicapai melalui pendidikan. Melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang religius, penuh kesadaran, berkepribadian, cerdas, berperilaku serta memiliki kreativitas tinggi sehingga siap untuk mengisi pembangunan (Notoatmojo, 2003:32).

Sumber daya manusia berkualitas merupakan aset dan potensi bangsa yang memegang peranan sangat penting dan mendasar dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan visi bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia tersebut tidak terlepas dari pendidikan. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warganya.

Berbagai survey internasional, seperti yang dilakukan oleh *McKinsey Global Institute* (MGI), terkait “*The Archipelago Economy*”, menyebutkan bahwa pada Tahun 2012/2013 kekuatan ekonomi Indonesia berada pada urutan ke-16 dan diprediksi meraih peringkat 7 terbesar di dunia tahun 2030. Pencapaian ekonomi Indonesia saat ini membutuhkan langkah, strategi sekaligus visi bersama. Jika tidak, Indonesia berpeluang terjebak dalam perangkap “*The Middle Income Trap*”, yakni keadaan negara dengan pertumbuhan ekonomi sangat pesat tetapi memiliki resiko politik, keuangan, dan sosial yang rawan, serta pertumbuhan yang hanya dinikmati segelintir elit (oligarki) dan gagalnya pemerataan hasil pembangunan. Perangkap tersebut bisa dihindari jika integritas pemangku kebijakannya mencapai tahap ideal, birokrasi yang efisien, infrastruktur pendidikan dan *publik service* yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana meraih target tersebut dengan melibatkan sebanyak mungkin warga Indonesia untuk menjadi “pemain utama” dan bukan sekedar kuli atau penonton.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui akselerasi bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan yang signifikan dapat menekan disparitas di berbagai bidang termasuk angka korupsi dan oligarki, akibat lemahnya sumber daya manusia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui penerapan kurikulum 2013, berupaya mendorong siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk aktif terlibat dalam mengamati, bertanya, mengasosiasikan,

dan melakukan eksperimen. Profil lulusannya diharapkan bisa kreatif, inovatif dan produktif.

Namun di sisi lain, data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin, 2012), menyebutkan bahwa sekitar 1,3 juta lulusan sekolah dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, berpotensi menganggur akibat tidak seimbangnya jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menandakan bahwa produk sekolah di Indonesia selain belum mampu menumbuhkan jiwa *enterpreneurship*. Padahal *enterpreneurship* diyakini merupakan salah satu persyaratan sebagai pencapaian target sebuah negara maju.

Kemudian merujuk kepada Survey UNDP 2012, kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berada di nomor urut 121, Indeks Kualitas Pendidikan (*Education Development Index*, EDI) Indonesia adalah 0.577, tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN. Padahal pada Tahun 2015 integrasi kawasan perdagangan bebas ASEAN akan dimulai. Maka tidak ada pilihan kecuali menyiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang siap dan kompetitif, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat merata dan mampu bersaing global. Salah satunya adalah dengan adanya pendidikan kejuruan atau yang sering dikenal sebagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Provinsi Lampung adalah provinsi pluralistik, yang terus melakukan pembenahan dan aktif melakukan pembangunan seiring berjalannya waktu, termasuk pada persoalan pendidikan. Berawal dari kentalnya perbedaan persepsi masyarakat mengenai pendidikan kejuruan/SMK dan pendidikan pada umumnya. Masyarakat menilai, menganggap bahwa pendidikan kejuruan masih kurang layak bila

dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Hal tersebut menyangkut kurikulum, uji kompetensi dan sertifikasi, serta masalah akreditasi sekolah. Dapat diamati pada jumlah sekolah yang mempengaruhi jumlah minat murid dan guru berdasarkan tingkat/jenis sekolah yang ada di Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Berdasarkan Tingkat/ Jenis Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2011-2012

No.	Jenis Sekolah	Status	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	SD	Negeri/Swasta	4.565	945.451	69.766
2.	SLTP	Negeri/Swasta	1.226	320.213	27.864
3.	SMA	Negeri/Swasta	476	162.547	12.695
4.	SMK	Negeri/Swasta	316	93.302	6.985

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2011-2012

Data di atas menggambarkan bahwa kondisi pendidikan kejuruan/SMK di Provinsi Lampung sangat berbeda jauh dengan pendidikan pada umumnya (SMA). Salah satu kemungkinan terjadinya hal demikian adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan (silabus kurikulum), anggaran pendidikan, dan kompetensi tenaga pendidik. Hal ini didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Bandar Lampung, Silabus dan kesiapan guru sangat penting untuk memudahkan mengimplementasikan kurikulum 2013. Kemendikbud sudah menjanjikan pedoman pembelajaran, namun silabus yang dijanjikan tidak kunjung diterima oleh guru (Media online Lampost, 18 Juli 2013).

Hal senada mengenai tenaga pendidik juga diakui oleh Parwono selaku Anggota Tim Pengembangan Kurikulum di Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa, sekitar 20 guru dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi

Lampung telah disiapkan sebagai instruktur nasional namun gagal mengikuti pelatihan guru inti karena terkendala anggaran (Media online Lampost, 18 Juli 2013).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti akan menganalisis, mendeskripsikan lebih lanjut terkait upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pendidikan kejuruan di Provinsi Lampung. Adapun pengembangan pendidikan kejuruan tersebut berdasarkan acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat.

SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan, yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.

Standar nasional pendidikan (SNP) adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi implementasi pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan mendeskripsikan strategi Pemerintah implementasi pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pengembangan konsep dalam ilmu administrasi publik, khususnya dalam konsep strategi implementasi pengembangan pendidikan kejuruan.
2. Secara operasional, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pijak bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung maupun Sekolah Kejuruan yang lain dalam mengembangkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah, dan sebagai penyempurnaan pelaksanaan strategi implementasi pada sekolah menengah kejuruan di waktu yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *Siralegos* atau *Strategus* dengan kata jamak *strategi*. *Sir-ateges* berarti jenderal tetapi dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara. Dalam artian yang sempit, strategi berarti seni jenderal (*the on* of general*). Memang dalam zaman Yunani kuno jenderal dianggap bertanggung jawab dalam peperangan kalah atau menang, Karena ia menguasai logistik dan sumber daya militer. Kemudian menurut Vancil (dalam Salusu, 2003:45) menyatakan bahwa strategi suatu organisasi adalah konseptualisasi yang diekspresikan oleh pemimpin organisasi itu, yaitu tentang:

- a. Sasaran jangka panjang dari organisasinya
- b. Kebijakan dan kendala
- c. Seperangkat rencana yang sedang berjalan mengenai tujuan jangka pendek.

Selanjutnya Hax dan Majluf (dalam Salusu, 2003:100) mencoba menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi yaitu:

- a. Strategi ialah pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumber daya.
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti

- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, kekuatan dan kelemahannya.
- e. Melibatkan semua tingkat hirarki dari organisasi.

Dengan definisi ini berarti strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Sedangkan menurut Glueck (Rochaety, 2005:26), strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai. Kemudian menurut Handoko (1991:86) strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Kala “program” dalam definisi tersebut menyangkut suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang dimainkan oleh pimpinan dalam perumusan strategi organisasi.

Strategi dapat juga didefinisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Definisi ini mengandung arti bahwa setiap organisasi selalu mempunyai strategi walaupun tidak pernah secara eksplisit dirumuskan. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi. Selanjutnya menurut Nichols (dalam Salusu, 2003:101) mengemukakan definisi strategi yang lebih sederhana yaitu suatu seni

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Kemudian menurut Robson (Rochaety, 2005:27), menyatakan bahwa strategi merupakan pola keputusan dari alokasi sumber yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut penulis, strategi adalah suatu taktik dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan eksternal didalam menghadapi setiap perubahan. Dulunya strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan. Kemudian fungsinya berubah yaitu untuk mencapai sasaran perang dan damai. Pada pertengahan abad 20 terjadi perubahan fungsi strategi, dimana pada saat itu kondisi-kondisi dalam lingkungan eksternal tidak lagi memberi jaminan keuntungan bagi berbagai usaha bisnis. Oleh karena itu strategi diperlukan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang muncul dari para pesaing. Dan rumusan-rumusan strategi tersebut akan menghasilkan siram keputusan yang berupa kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Kebijakan menurut Anderson (Islamy, 2001:17), yaitu : serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Pendapat George C. Edwards III (Islamy, 2001:18) yang menyatakan bahwa “Kebijakan Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah”, sehingga suatu kebijakan tidak hanya suatu tindakan yang diusulkan tetapi juga yang tidak dilaksanakan. Demikian pula pendapat Thomas Dye (Subarsono, 2011:2) yang mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan, pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islamy menyatakan kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan

atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat *Easton* (Islamy, 2001:19) bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana dikatakan Amara Raksasataya (Islamy, 2001:19) mengemukakan bahwa suatu kebijakan harus memuat elemen-elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan strategi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.

Mendasari pengertian kebijakan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan KB termasuk kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Dalam pelaksanaan kebijakan KB di BKKPN mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho (2011:51) bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Sehingga kebijakan publik mudah untuk dipahami dan mudah diukur, disamping itu harus mengandung beberapa hal sebagaimana yang disampaikan oleh Kismartini (2005:16), bahwa terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*).

- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek.
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan,
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.
- e. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan (Wahab, 2005:64).

Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2001:192), Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Definisi di atas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Sedangkan pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2001:192) adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sejalan dengan kutipan di atas maka menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah: Implementasi dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti menginterpretasikan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan/program. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan/program yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Karena implementasi akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

D. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung

secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Sekalipun banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli. Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli :

1. Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.

Model mereka ini kerap kali oleh para ahli disebut sebagai "*The top down approach*". Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara sembrono/asal-asalan, melainkan karena kebijakan itu sendiri tidak tepat penempatannya.

- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil

- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2001:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan .

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi miti interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompokkelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor.

3. Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III

Sementara menurut George Edwards III (Nugroho, 2011:63) ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain:

a. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

c. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Organisasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan/atau pemerintah.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para

pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

Model implementasi inilah yang akan digunakan penulis di lapangan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung. Alasan penulis menggunakan model ini karena variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh George Edwards III merupakan variabel yang bias menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih kongkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya.

E. Tinjauan Tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

Pendidikan kejuruan merupakan upaya menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar untuk membantu mereka dalam mengembangkan diri dan potensinya. Oleh karena itu, keunikan tiap individu dalam berinteraksi dengan dunia luar melalui pengalaman belajar merupakan upaya terintegrasi guna menunjang proses perkembangan diri anak didik secara optimal. Kondisi ini tertampilkan dalam prinsip pendidikan kejuruan "*learning by doing*", dengan kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja (Sugiyono, 2003:87)

Tujuan dan isi pendidikan kejuruan senantiasa dibentuk oleh kebutuhan masyarakat yang berubah begitu pesat, sekaligus juga harus berperan aktif dalam ikut serta menentukan tingkat dan arah perubahan masyarakat dalam bidang kejuruannya tersebut. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.

Dari tujuan pendidikan kejuruan tersebut mengandung makna bahwa pendidikan kejuruan di samping menyiapkan tenaga kerja yang profesional juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program kejuruan atau bidang keahlian.

Pendidikan kejuruan harus memandang anak didik sebagai individu yang selalu dalam proses untuk mengembangkan pribadi dan segenap potensi yang dimilikinya. Pengembangan ini menyangkut proses yang terjadi pada diri anak didik, seperti proses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih pandai, menjadi lebih matang, yang menyangkut proses perubahan akibat pengaruh eksternal, antara lain berubahnya karir atau pekerjaan akibat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. (Sugiyono, 2003:89)

Perkembangan teknologi menuntut adanya perkembangan pula pada pendidikan kejuruan, karena saat ini tatanan kehidupan pada umumnya dan tatanan perekonomian pada khususnya sedang mengalami pergeseran paradigma ke arah global. Pergeseran ini akan membuka peluang kerja sama antar negara dan di sisi lain, persaingan antar negara semakin ketat. Untuk meningkatkan kemampuan

persaingan dalam perdagangan bebas, diperlukan serangkaian kekuatan daya saing yang tangguh (Simamora, 2002:57).

Pendidikan kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi (Djojonegoro, 1999:102).

Atas dasar itu, pengembangan kurikulum dalam rangka penyempurnaan pendidikan menengah kejuruan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Tuntutan peserta didik dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja perlu dijadikan sumber pijakan di dalam merumuskan tujuan pendidikan kejuruan. SMK sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU Sisdiknas, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, yang dirumuskan dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

F. Acuan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Ada 3 (tiga) konsep dasar yang perlu dibedakan dalam peningkatan mutu yaitu kontrol mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*) dan mutu terpadu (*total quality*). Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang

paling tua. Kegiatannya melibatkan deteksi dan eliminasi terhadap produk-produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Tujuannya hanya untuk menerima produk yang berhasil dan menolak produk yang gagal. Dalam dunia pendidikan, kontrol mutu diimplementasikan dengan melaksanakan ujian sumatif dan ujian akhir. Hasil ujian dapat dijadikan sebagai bahan untuk kontrol mutu (Tilaar, 2002:7).

Jaminan mutu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin proses produksi agar dapat menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi tertentu. Jaminan mutu adalah sebuah cara menghasilkan produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Lanjutan dari konsep jaminan mutu adalah *Total Quality Management (TQM)* yang berusaha menciptakan sebuah budaya mutu dengan cara mendorong semua anggota stafnya untuk dapat memuaskan para pelanggan. Dalam konsep TQM pelanggan adalah raja. Inilah yang merupakan pendekatan yang sangat populer termasuk dalam dunia pendidikan. Sifat TQM adalah perbaikan yang terus menerus untuk memenuhi harapan pelanggan (Gordon, 2001:9).

Dalam TQM, mutu adalah kesesuaian fungsi dengan tujuan, kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang ditentukan, sesuai dengan kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sistem manajemen mutu pendidikan adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan satuan pendidikan dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*continous improvement*).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berlaku saat ini bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi SPMP terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang secara *siklik* dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas dilaksanakan secara kolaboratif antara satuan pendidikan dengan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) yaitu penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.

SPMP berbasis pada data dan pemetaan yang valid, akurat, dan empirik. Data yang dikumpulkan oleh sekolah dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, dan profil sekolah. Selain itu Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan instrumen implementasi SPMP yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai salah satu program akseleratif dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor 2 Tentang Pendidikan)

2. Acuan Mutu Pendidikan Berdasarkan Standar Pendidikan Nasional

Acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Standar nasional

pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan lain yang relevan, yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Terdapat 8 (delapan) SNP yaitu:

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Delapan SNP di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses

adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

G. Kerangka Pikir

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dapat dilaksanakan melalui pendidikan. Begitu juga dengan Undang-Undang Sisdiknas yang dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat di tengah persaingan zaman. Melalui pendidikan yang dimaksudlah diharapkan dapat pula melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengikuti arus persaingan global.

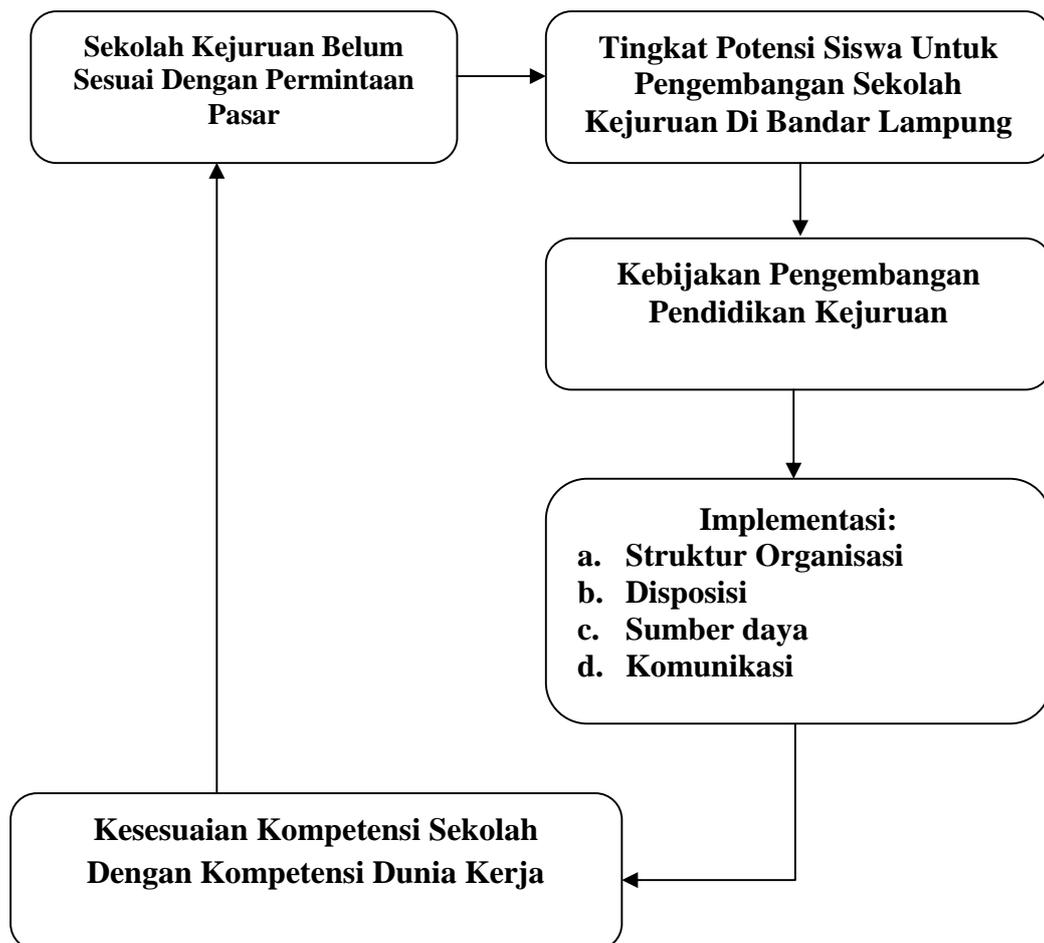
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi plural yang terus melakukan pembenahan secara berkala, termasuk melakukan pembenahan dalam bidang pendidikan. Disayangkan keadaan pendidikan kejuruan/SMK di Provinsi Lampung masih kurang layak bila dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Kualitas SDM masih rendah, disebabkan oleh faktor-faktor pendidikan, kondisi sekolah tingkat penyebarannya belum merata, kondisi sekolah kejuruan yang ada belum memenuhi permintaan pasar.

Dalam hal ini tentu saja Pemerintah Daerah ikut berperan penting dalam pengembangan pendidikan, yaitu dalam pengembangan pendidikan kejuruan khususnya. Pengembangan tersebut sebagai respon terhadap harapan masyarakat, akan perlunya lembaga pendidikan yang berkualitas, yang dapat mencetak sumber

daya manusia yang berkualitas di daerah guna meningkatkan daya saing dalam pencatutan kehidupan global dan perdagangan bebas.

Mengacu pada hal tersebut, maka peneliti akan mencoba menganalisis dan mendeskripsikan lebih lanjut terkait upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pendidikan kejuruan di Provinsi Lampung, yaitu berupa program khusus untuk pengembangan pendidikan kejuruan, yang kemudian akan dinilai keberhasilannya sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh (*holistic*), dinamis dan tidak mengeneralisasi (Moleong, 2002:3). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung.

Bogdan dan Taylor mengatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati (Pawito, 2007:84). Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendiskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci. Dalam strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung ini peneliti melihat bagaimana model yang digunakan dalam sebuah penerpan kebijakan.

B. Fokus Penelitian

Sugiyono (2001:5), menjelaskan bahwa untuk mempertajam penelitian kualitatif, peneliti harus menetapkan fokus penelitian, yang merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dengan situasi sosial. Fokus penelitian sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif. Fokus penelitian memberi batasan dalam studi dan batasan dalam mengumpulkan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berupa program pendidikan yang dicanangkan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mengembangkan pendidikan kejuruan khususnya di SMKN 4 Bandar Lampung, yaitu dari bentuk atau wujud program, implementasi program, hingga dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Kemudian akan dinilai keberhasilannya sesuai dengan teori implementasi. Fokus penelitian ini di fokuskan pada Implementasi kebijakan dengan variabel yang terdapat dalam Model George Edwards III yang antara lain meliputi:

a. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisas dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan,

sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.

Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

c. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Organisasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung dipilih menjadi lokasi penelitian dengan alasan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang sejak tahun 2013 telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengimplementasikan dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung. Untuk itu penelitian ini dilakukan di dalam lingkup lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

- 2) SMK Negeri 4 Bandar Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai pengembangan pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung. Teknik pemilihan orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Alasan pemakaian teknik *purposive* dikarenakan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Penentuan orang yang diwawancarai atau responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dikarenakan orang tersebut menduduki posisi terbaik yang dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan topik penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, website, artikel, dan referensi-

referensi yang menjadi panduan penyusunan kebijakan Kota Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkap yaitu wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2009:31). Peneliti harus dapat mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui sebelum melakukan wawancara agar data yang diinginkan bisa tercapai dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini antara lain :

- a. Seksi Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- b. Hubungan Masyarakat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009:31), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis yang diperoleh dari institusi yang menjadi lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada pada lembaga yang terkait pengembangan pendidikan kejuruan antara lain: Dinas Pendidikan, dan SMK di Kota Bandar Lampung. Di samping dokumen tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan pencarian informasi melalui internet.

3. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2009:31). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, yaitu di Lingkungan SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Penelitian di lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang benar-benar mengetahui dan melakoni proses interaksi antar institusi pelaksana kebijakan yaitu SMK Negeri 4 Bandar Lampung serta mengamati kondisi dan lokasi penelitian secara langsung.

F. Analisis Data

Tahap pengolahan data tidak cukup hanya terdiri atas tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi mencakup banyak tahap. Di antaranya adalah tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih dari sekedar itu, pengolahan data, yang tidak lain merupakan tahap analisis dan interpretasi data mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan proses analisis data model interaktif (Pawito, 2007:104), yaitu analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yang terdiri :

- a. Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.
- b. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh peneliti. Moleong (2002:327) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan):

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, menurut Sugiyono triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Di mana penulis menggunakan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumenter.

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci“, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data (terlampir) serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian Data (*confirmability*)

Kepastian Data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat SMK Negeri 4 Bandar Lampung

Lampung merupakan salah satu provinsi Indonesia yang penuh dengan potensi.. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, jumlah penduduknya..semuanya merupakan potensi yang luar biasa, untuk memajukan provinsi lampung salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui dunia pendidikan, dengan menciptakan lulusan akademik yang mampu bersaing baik di lingkungan provinsi lampung, nasional maupun internasional

SMKN 4 Bandar Lampung yang merupakan salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berperan serta dalam memajukan provinsi lampung terutama di dalam bidang pendidikan, sebagai sekolah kejuruan SMKN 4 Bandar Lampung Berusaha menghasilkan siswa/i yang memiliki nilai jual yang tinggi sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih ketika menempuh pendidikan sekolah, memiliki 6 pilihan jurusan, dan didukung dengan fasilitas pembelajaran berbasis TIK dan guru yang sudah berpengalaman dibidangnya

Tata guna tanah SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Tata Guna Letak Lahan SMK Negeri 4 Bandar Lampung

No	Penggunaan	Luas
1	Luas bangunan	12000 m ²
2	Luas kebun	1500 m ²
3	Luas lahan praktek	4000 m ²
4	Luas lapangan olahraga	1000 m ²
5	Luas taman	1200 m ²

(Sumber : Data Monografi SMK N 4 Balam Tahun 2014)

B. Visi dan Misi SMK Negeri 4 Bandar Lampung

Visi SMK Negeri 4 Bandar Lampung adalah “Mewujudkan SMK Negeri 4 Bandar Lampung sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berstandar Teknologi dan Industri”.

Misi pada SMK Negeri 4 Bandar Lampung, sebagai berikut :

1. Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan diri di era global.
2. Menyiapkan tenaga terampil yang mampu bersaing di lapangan kerja.
3. Menyiapkan wirausahawan yang tangguh dalam bidang Teknologi dan Industri berstandart Teknologi dan Industri.

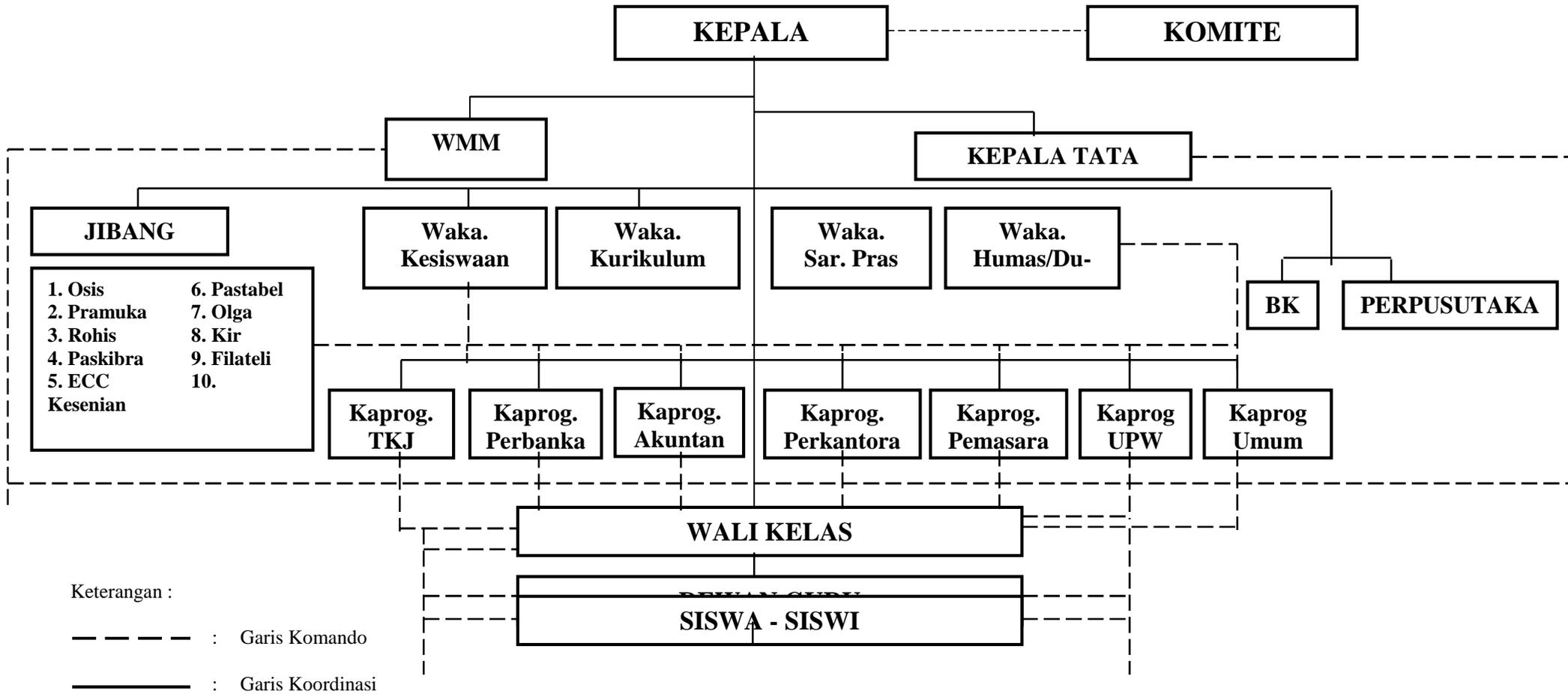
C. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga pendidikan struktur organisasi itu sangat penting peranannya. Struktur organisasi merupakan bagan yang di dalamnya memuat tugas dan tanggung jawab sekelompok orang yang diharapkan antara satu dengan yang lain dapat bekerja sama dalam mencapai satu tujuan. dengan baik, dan dengan penempatan personil yang sesuai dengan keahliannya dalam struktur

organisasi yang merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat keberhasilan program kerja sama organisasi dalam mencapai tujuan.

Adapun struktur organisasi SMK Negeri 4 Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Orgnisasi SMK Negeri 4 Bandar Lampung



Struktur organisasi SMK Negeri 4 Bandar Lampung tersebut terdiri atas :

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah dalam manajemen sekolah sebagai prestasi atau kemampuan kerja. Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai seorang pendidik, administrator yang profesional, supervisor, leader, inovator dan motivator. Sebagai pemimpin kepala sekolah harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan komponen sekolah.

2. Komite Sekolah

Komite sekolah berperan dalam membina dan menghimpun potensi warga sekolah dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah yang berkualitas.

3. Kepala Tata Usaha

Kepala tata usaha berperan dalam menyusun program tata usaha sekolah, mengurus administrasi ketenagaan dan siswa, membina dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah, menyusun administrasi perlengkapan sekolah, menyusun dan penyajian data/statistik sekolah, membuat laporan kegiatan tata usaha.

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Wakil kepala sekolah berperan dalam menyusun program pengajaran, pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, jadwal ulangan atau evaluasi, kriteria kenaikan atau tidaknaikan kelulusan.

5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan berperan dalam menyusun program pembinaan OSIS, melaksanakan pembimbingan dan pengarahan kegiatan OSIS,

pemilihan siswa teladan atau penerima beasiswa, mutasi siswa, program ekstra kurikuler, membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.

6. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Wakil kepala sekolah bidang sarana berperan dalam menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana, pengelola pembiayaan alat-alat pengajaran, dan menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana secara berkala.

7. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Wakil kepala sekolah bidang humas berperan dalam mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua/wali siswa, membina hubungan antar sekolah, komite sekolah, lembaga dan instansi terkait, dan membuat laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala.

8. Koordinator BP/BK

Koordinator BP/BK berperan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung, mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, kelanjutan studi, perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah mereka tamat, dan masalah sosial emosional sekolah yang bersumber dari sikap siswa yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan yang lebih luas.

9. Dewan Guru

Guru berperan dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan siswa melalui proses belajar mengajar di sekolah serta berperan dalam pembentukan kepribadian setiap siswa.

10. Siswa

Siswa merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai pelaku pencari, penerima, dan penyimpan pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

D. Sarana dan Prasarana SMK Negeri 4 Bandar Lampung

Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di SMK Negeri 4 Bandar Lampung tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana SMK Negeri 4 Bandar Lampung

No	Bangunan	Luas (m ²)
1	Ruang teori / kelas	840
2	Ruang perpustakaan	20
3	Ruang komputer	42
4	Ruang serba guna	400
5	Ruang kepala sekolah	18
6	Ruang wakil kepala sekolah	12
7	Ruang guru	42
8	Ruang tata usaha	36
9	Ruang reproduksi/lab.praktek	130
10	Ruang kami/WC guru	10
11	Ruang UKS	12
12	Ruang BP/BK	-
13	Ruang OSIS	-
14	Masjid	100
15	Ruang Kantin	40
16	Ruang media pendidikan	12
17	Ruang Gudang	70
18	Ruang KM/WC Siswa	12
19	Pos satpam, lap. Olahraga/upacara	450

(Sumber : Hasil riset data SMK N 4 Balam tahun 2013)

1. Ruang kelas atau ruang teori yang tersedia di SMK Negeri 4 Bandar Lampung sebanyak 36 kelas. Dalam peakaiannya ruangan ini digunakan secara bergilir

sesuai jadwal yang ditentukan mulai dari jam pelajaran awal sampai akhir sekolah.

2. Ruang Laboratorium atau praktek terdiri dari dua laboratorium yaitu laboratorium komputer dan laboratorium praktek jurusan. Laboratorium praktek tersedia kurang lebih 16 ruang, yaitu ruang kerja kayu, ruang kerja batu, ruang kerja bangku, ruang pemeliharaan dan perbaikan, ruang lafalo, ruang ukuran tanah, ruang plumbing, ruang kerja mesin, ruang reparasi listrik, ruang instalasi, ruang kerja kayu mesin, ruang kerja kayu tangan, ruang kerja elektronik, ruang otomotif, ruang casis perbaikan, dan ruang listrik.
3. Ruangan perpustakaan serta lapangan olahraga yang luas di SMK Negeri 4 Bandar Lampung.

E. Kondisi SDM SMK Negeri 4 Bandar Lampung

1. Keadaan Karyawam SMK Negeri 4 Bandar Lampung

Sekolah SMK Negeri 4 Bandar Lampung, ini mempunyai 15 karyawan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4 Daftar Karyawan SMK Negeri 4 Bandar Lampung

No	Bidang	Jumlah
1	Administrasi	5
2	Sarana dan Prasarana	2
3	Teknik Keuangan	3
4	Keamanan dan Kebersihan	5
Jumlah		15

(Sumber : Data Monografi SMK N 4 Balam Tahun 2014)

2. Keadaan Guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung

Dewan guru yang berada di SMK Negeri 4 Bandar Lampung tersebut seluruhnya berjumlah 123 guru. Mereka semua berlatar belakang sarjana dan berasal dari

berbagai lulusan fakultas. Pada umumnya mereka mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidangnya masing - masing.

Tabel 5. Daftar Keadaan Guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung

No	Tenaga Guru	PNS	Honorir
1	Adaptif	26	5
2	Normatif	27	2
3	Produktif	60	3
Jumlah		113	10

Sumber: Data Monografi SMK N 4 Balam Tahun 2014)

3. Keadaan Guru Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui keadaan guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6. Keadaan Guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	35	28,45
2	Perempuan	88	73,33
Jumlah		123	100

Sumber: Data Monografi SMK N 4 Balam Tahun 2014)

4. Keadaan Guru Menurut Status Pegawai

Untuk mengetahui keadaan guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung berdasarkan status kepegawaian, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Keadaan Guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung Menurut Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah	Presentase(%)
1	PNS	113	91,87
2	Honorir	10	8,13
Jumlah		123	100

(Sumber: Data Monografi SMK N 4 Balam Tahun 2014)

5. Keadaan Guru Menurut Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui jumlah guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung berdasarkan status pendidikan terakhir, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8. Keadaan Guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung Menurut Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan. Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
1	S3	3	2,44
2	S2	42	35,00
3	S1	67	55,83
4	D3	8	6,67
Jumlah		123	100

(Sumber : Data Monografi SMK N 4 Balam Tahun 2014)

6. Keadaan Guru Menurut Status Golongan

Untuk mengetahui keadaan jumlah guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung berdasarkan status golongan, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 9. Keadaan Guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung Menurut Status Golongan

No	Status Pegawai	Jumlah	Presentase (%)
1	IVa – IVd	60	48,78
2	IIIa – IIIId	53	43,09
3	IIa – IIId	-	-
4	Tidak berstatus	10	8,13
Jumlah		123	100

(Sumber : Data Monografi SMK N 4 Balam Tahun 2014)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembahasan Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bandar Lampung.

sebagai berikut :

1. Komunikasi

Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu:

- a. Pada indikator transmisi, pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kejuruan dalam pemberian informasi sudah dilakukan berupa pelatihan, diskusi, bimbingan teknis dan dialog mengenai pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya pemberian pelatihan terhadap guru di SMK N 4 Bandar Lampung.
- b. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kejuruan pemberian informasi belum berjalan baik, yaitu dilakukan secara langsung terhadap target atau objek sasaran berupa pelatihan, diskusi, bimbingan teknis dan dialog mengenai Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kejuruan.
- c. Pada indikator konsisten, pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kejuruan belum berjalan konsisten. Hal ini dikarenakan pemberian informasi dan

keputusan yang diberikan pihak sekolah masih berubah-ubah dan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan oleh pembuat kebijakan. Sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana Pengembangan Pendidikan Kejuruan di sekolah.

2. SumberDaya

Adapun indikator-indikator yang ada, sebagai berikut:

- a. Pada indikator Sumber Daya Manusia (*staff*), pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kejuruan ini masih banyak guru yang merasakan kebingungan. Terutama pada saat guru dituntut untuk merubah pola pikir (*mindset*) dan berinovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dalam hal ini pihak sekolah belum mempersiapkan secara matang upaya untuk memberikan pemahaman kepada guru agar tujuan pengembangan pendidikan kejuruan dapat dijalankan dengan baik.
 - b. Pada indikator sumberdaya non manusia (sarana prasaran), dalam Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 belum terpenuhi dengan baik. Karena terhambatnya pembangunan lab praktikum dan alat praktikum murid yang disiapkan oleh pihak sekolah. Pengembangan Pendidikan Kejuruan tidak dapat berjalan secara efektif bila lab praktikum dan alat praktikum murid masih belum disiapkan secara tepat.
- ## 3. Disposisi dalam Strategi Implementasi pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung cukup baik.
- Pelaksana pengembangan dalam hal ini selalu siap dan bertanggungjawab

untuk melaksanakan pengembangan pendidikan kejuruan seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pihak sekolah demi membangun pendidikan kejuruan lebih baik di kota Bandar Lampung. Sikap pelaksana kegiatan dituntut dapat bekerjasama secara baik antar instansi terkait, hal ini dikarenakan untuk sistem yang telah ada dapat berjalan dengan sistematis atau sesuai dengan target yang dicanangkan pihak sekolah.

4. Struktur birokrasi dalam Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada, sebagai berikut:
 - a. Pada indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 ini belum berjalan baik dilihat dari aspek SOP dalam bentuk juknis yang belum dipahami dan dijalankan secara detail tugas dan tanggung jawab oleh guru sebagai pelaksana Pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4.
 - b. Pada indikator Fragmentasi dalam Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 ini belum berjalan baik dilihat dari belum terjalinnya koordinasi antar sekolah dengan pihak guru untuk membuat tim khusus agar dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan atau stakeholder agar lulusan dari sekolah dapat diterima dan bekerja di perusahaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan pendistribusian alat praktikum dan pembangunan lab praktikum, mengingat praktek dalam sekolah kejuruan agar menghasilkan hasil pembelajaran produktif.
2. Untuk mengatasi permasalahan terkait sulitnya mengubah pola pikir dan cara mengajar guru dari metode ceramah ke metode yang lebih menarik dan interaktif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti lebih menitik beratkan proses praktikum pada proses belajar mengajar.
3. Diperlukan SOP yang jelas untuk mengatur pola pengembangan pendidikan kejuruan dan juga diperlukan tim khusus untuk memperluas kerja sama dengan perusahaan dan stakeholder bonafit agar lulusan dari SMKN 4 dapat langsung bekerja di perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko. T. Hani, 1991, *Manajemen Personalia Dan sumber Daya Manusia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kismartini, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketujuhbelas. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notoatmojo, S. 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elekmedia Komputindo, Jakarta.
- Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKIS, Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Rochaety Eti. 2005, *Kamus Istilah Ekonomi*. Cetakan Pertama. Bumi Aksara, Jakarta.
- Salusu J., 2003, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Subarsono, A.G. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, S., 2005, *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*. Bumi aksara. Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Buku Kita, Jakarta.